

PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENDAPATAN TERHADAP PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI ACEH

Zulkifli, Amri dan Muhammad Ikhwan

Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Koresponden penulis : zulkifli_aja2003@yahoo.com

Abstrak : This study aimed to analyze the effect of government spending on education and per-capita income to the development of education in the province of Aceh by using panel data. The literacy rate, enrollment rate of primary and secondary schools were utilised to measure the development of education sector as the dependent variable, while public spending on the education sector and per-capita income were used as the independent variables. This study covers 23 districts/cities in Aceh province over a period of years 2008-2012. Based on the Random Effect Model of panel data analysis, the study documented that the government spending on education and percapita income positively and significantly impacted the literacy rate. However, the government spending on the education sector did not significantly influence the enrollment rate of primary school, junior high school, and senior high school. Although the percapita income have no significant impact to the primary school enrollment rate and junior high school, but it has an effect on the enrollment rate of senior high school. The results of this study imply that in order to promote the development of education in the province, the government should increase the budget allocation of income and expenditure for the education sector

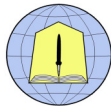
Keywords : Government spending, education sector, percapita income, literacy rate, school enrollment rates, Random Effect Model, budget

PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001 silam melalui UU No. 20 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, menyebabkan terjadinya pelimpahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan pertimbangan bahwa daerah lebih memahami dan mengetahui kebutuhan masyarakat lokal, sehingga pemberlakuan kebijakan tersebut mampu mewujudkan akselerasi pembangunan di daerah, terutama di dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Peningkatan perekonomian daerah dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu yang dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Upaya pemerintah daerah di Indonesia dalam meningkatkan perekonomian daerah masing-masing menunjukkan angka yang relatif stabil pada tahun 2012. Berdasarkan data BPS pada tahun yang sama menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia mencapai 6,53 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Papua Barat, dengan laju pertumbuhan sebesar 15,90 persen dan provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki laju pertumbuhan terendah, yaitu -1,10 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh mencapai 5,14 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh yang mencapai 5,14 pada tahun 2012 menandakan bahwa kinerja ekonomi Aceh menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan perkapita, kinerja perekonomian Aceh juga mengalami peningkatan secara keseluruhan yang mencapai 7,74 rupiah dengan migas, sedangkan tanpa migas mencapai 6,91 juta rupiah (BPS, 2012). Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, Kota Banda Aceh memiliki PDRB Per kapita riil tertinggi mencapai 14,41 juta rupiah, sedangkan Kabupaten Simeulu memiliki PDRB per Kapita riil terendah sebesar 3,48 juta rupiah atau tumbuh sekitar 5,14 persen dari tahun 2011. Walaupun demikian, pertumbuhan PDRB per kapita yang terjadi di Aceh masih menyisakan



sejumlah permasalahan di dalam masyarakat, terutama permasalahan mengenai pembangunan pendidikan.

Permasalahan-permasalahan pendidikan di Aceh dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan, seperti Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SD, SMP, dan SMA. Angka melek huruf (AMH) Aceh tahun 2012 mencapai 96,11 persen. Hal ini berarti bahwa 3,89 persen penduduk Aceh yang tidak bias membaca atau buta huruf, sedangkan rata-rata partisipasi sekolah masyarakat Aceh mencapai 89,40 persen (BPS, 2012).

Ketimpangan pendidikan di Aceh jelas terlihat dari angka melek huruf (AMH) antar wilayah bagian di provinsi Aceh, baik bagian utara-timur, barat-selatan, maupun bagian tengah. Periode 2008-2012 AMH bagian utara-timur memiliki angka tertinggi dibandingkan wilayah lainnya yang mencapai 97,00 persen pada tahun 2008 sedangkan bagian tengah memiliki angka paling rendah yakni di bawah 96,00 pada tahun yang sama. Hingga tahun 2012 ketiga bagian wilayah tersebut mengalami peningkatan AMH secara bersamaan, yakni 98,10 persen untuk wilayah bagian utara-timur dan 95,83 persen untuk wilayah tengah dan barat-selatan (BPS, 2012). Sedangkan untuk indikator angka partisipasi sekolah (APS) Provinsi Aceh juga terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2012, angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA mencapai 99,35 persen, 94,41 persen dan 74,44 persen, pencapaian angka-angka tersebut melebihi angka partisipasi sekolah nasional, meskipun demikian pencapaian angka-angka tersebut belum terjadi merata di tingkat kabupaten/kota di Aceh.

Kemajuan pembangunan pendidikan di Aceh tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan pendapatan riil daerah saja, tetapi perhatian pemerintah melalui anggaran dana terhadap pembangunan pendidikan melalui APBD provinsi maupun APBD Kabupaten/ Kota. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berdampak terhadap peningkatan angka melek huruf serta tingkat keinginan bersekolah lebih lama dari masyarakat. Menurut Yenny (2008) peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan mempengaruhi angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Indonesia (2012), alokasi anggaran sektor pendidikan di Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun 2007-2012. Pada tahun 2007 total anggaran pendidikan di Provinsi Aceh mencapai 2,21 triliun rupiah, tahun 2008 total anggaran pendidikan mengalami peningkatan drastis yakni 4,02 triliun rupiah, atau adanya peningkatan sebesar 81,87 persen dari tahun 2007, hingga tahun 2012 total belanja pendidikan di Aceh sebesar 5,585 triliun rupiah. Peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2008, diakibatkan oleh adanya tambahan alokasi anggaran dari dana otonomi khusus (otsus) yang diterima oleh Aceh guna mendukung proses percepatan pembangunan di Aceh.

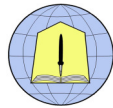
Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan serta kenaikan PDRB per kapita riil yang terjadi di seluruh wilayah provinsi Aceh menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen besar dalam upaya meningkatkan penyediaan layanan publik terutama penyediaan akan kebutuhan pendidikan. Namun, peningkatan yang terjadi belum tentu dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari permasalahan pemerataan pembangunan pendidikan yang masih terjadi antar wilayah yang ada di Aceh.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita terhadap pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh..

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS)



Provinsi Aceh. Jenis data yang digunakan merupakan data panel sekunder berupa data pengeluaran pemerintah pada pendidikan, PDRB per kapita riil, angka melek huruf, dan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun 2008-2012.

Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data panel (pooled data) untuk melihat hubungan variabel-variabel yang diteliti, serta dianalisis menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesa. Menurut Greene (2003) dalam mengestimasi data panel dapat digunakan 3 model pendekatan, Pertama Pooled Least Square (PLS) atau Common Effect Model (CEM) yaitu menggabungkan seluruh data time-series dan cross-section, kemudian diestimasi dengan model OLS (Ordinary Least Square). Namun, konsekuensi yang harus diterima dari penggabungan kedua data ini, kita tidak dapat membedakan antara objek/individu dengan waktunya. Sehingga diasumsikan bahwa perilaku data antar individu sama dalam rentang waktu tertentu. Asumsi ini sangat bertentangan dengan realita sebenarnya karakteristik antar individu jelas sangat berbeda.

Kedua, Model Efek Tetap (Fixed Effect Model) atau dikenal juga dengan Least Square Dummy Variable (LSDV) merupakan model estimasi panel yang menggunakan variabel boneka (dummy variable) di dalam persamaan regresinya, selain itu estimasi dengan Model efek tetap juga berasumsi bahwa intersep setiap individu dan waktu dapat berubah-ubah atau tidak konstan.

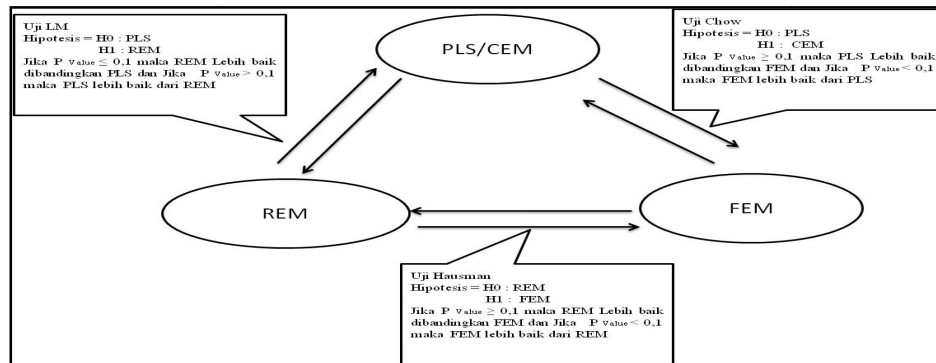
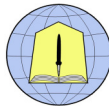
Ketiga, Model Efek Random (Random Effect Model/REM). Perbedaan yang mendasar antara FEM dan REM terletak pada karakteristik antar-individu dan antar-waktu, jika pada FEM perbedaan antar individu dan waktu dicerminkan melalui intersep, maka pada REM perbedaan tersebut diakomodasikan pada error dari model, karena error mungkin berkorelasi sepanjang time-series dan cross-section. Sehingga random error pada REM juga harus dijabarkan untuk menjadi error pada komponen individu dan gabungan.

Pemilihan Model Data Panel

Pemilihan model yang tepat dan sesuai dalam estimasi data panel dapat digunakan beberapa pengujian. Pertama Uji Chow (Chow Test) atau dikenal juga dengan Uji F yaitu bentuk pengujian data panel yang digunakan untuk memilih diantara dua model analisis data panel, yaitu Pooled Least Square (PLS) dan Fixed Effect Model (FEM).

Kedua, Uji Hausman (Hausman Test) yaitu pengujian yang digunakan untuk menentukan model yang tepat antara pendekatan Fixed Effect dan Random Effect. Pengujian ini mengikuti distribusi Chi-square (χ^2) dan berderajat bebas $(k-1)$. Menurut Johnston dan Dinardo (1997) dalam menentukan antara fixed effect (FE) dan random effect (RE) tergantung dari korelasi antara komponen error cross-section (α) dengan regresornya, jika komponen cross-section error dan variabel penjelasnya saling berkorelasi, maka FE lebih tepat dibandingkan dengan RE, dan sebaliknya.

Ketiga, Uji LM (Langrangian Multiplier Test) adalah bentuk pengujian yang digunakan untuk membandingkan antara PLS dan REM. Pengujian ini digunakan ketika hasil Uji Chow dan Uji Hausman tidak konsisten. Menurut Breusch-Pagan (Greene, 2003) dalam menentukan antara REM dan PLS dapat dilihat dari nilai korelasi antar komponen residual. Jika tidak ada korelasi antar komponen residual atau nilai korelasi antar komponen residual bernilai 0 maka PLS lebih cocok dibandingkan REM. Namun, jika terdapat korelasi antar komponen residual atau nilai korelasi antar residual tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa REM lebih baik dibandingkan dengan PLS.



Gambar 1. Pemilihan Model Data Panel

Model Analisis

Model Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda (Multiple regression model) pada data panel, dengan persamaan sebagai berikut :

$$PP = f(\text{PSP}, \text{PDRBK}) \dots\dots\dots(3.1)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

$$\text{AMHit} = \alpha + \beta_1 \text{Ln PSPit} + \beta_2 \text{Ln PDRBKit} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3.1a)$$

$$\text{APSD/MI it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln PSPit} + \beta_2 \text{Ln PDRBKit} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3.1b)$$

$$\text{APSSMP it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln PSPit} + \beta_2 \text{Ln PDRBKit} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3.1c)$$

$$\text{APSSMA it} = \alpha + \beta_1 \text{Ln PSPit} + \beta_2 \text{Ln PDRBKit} + \epsilon_{it} \dots\dots\dots(3.1d)$$

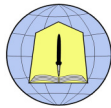
Dimana PP adalah pembangunan Pendidikan, PSP adalah Pengeluaran Pemerintah Pada pendidikan dalam satuan rupiah, PDRBK adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita harga konstan dalam satuan rupiah, AMH adalah Angka Melek Huruf, APS adalah Angka Partisipasi Sekolah semua jenjang pendidikan, α adalah Konstanta, β_1 dan β_2 adalah Koefisien regresi, ϵ adalah Error term, i adalah variabel untuk 23 kabupaten/kota, dan t adalah time- series data 2008-2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf provinsi Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga tahun 2012, melek aksara Aceh tahun 2008 mencapai 95,94 persen dan berada pada peringkat ke 10 dari 33 provinsi di Indonesia (UNDP,2010) hingga tahun 2012 melek aksara provinsi Aceh mencapai 96,11 persen. Namun, peningkatan angka melek huruf secara agregat tersebut, tidak diikuti dengan pemerataan peningkatan angka melek huruf di beberapa bagian Provinsi Aceh.

Berdasarkan kabupaten/kota. Kota Lhokseumawe memiliki AMH tertinggi dibandingkan dengan 22 Kabupaten/kota lainnya, dengan AMH mencapai 98,82 persen pada tahun 2008 dan 99,65 persen pada tahun 2012. Sedangkan Kabupaten Gayo Lues memiliki AMH terendah yakni 87,89 persen pada tahun 2012 (BPS, 2012).



Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut UNDP (2008) Angka partisipasi sekolah provinsi Aceh berada di atas rata-rata partisipasi sekolah nasional. Hal ini berlaku untuk semua jenis pendapatan dan jenjang pendidikan, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah. Tingginya angka partisipasi tersebut menandakan bahwa masyarakat Aceh memiliki keinginan besar untuk mengetahui dan mempelajari sesuatu hal yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan.

APS 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh mengalami peningkatan pada tahun 2012, di tingkat sekolah dasar angka partisipasi sekolah semua kabupaten / kota mencapai 99,00 persen, kecuali Aceh Jaya, Aceh Singkil, Langsa dan Subulussalam, dimana kabupaten/kota tersebut memiliki tingkat partisipasi sekolah dasar di bawah 99,00 persen. Kemudian, di tingkat sekolah menengah pertama, rata-rata kabupaten/kota dapat melampaui angka partisipasi provinsi sebesar 94,41 persen, kecuali Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Nagan Raya, dan Kota Subulussalam. Sedangkan di tingkat sekolah menengah atas, beberapa kabupaten/kota memiliki angka partisipasi mencapai 80 persen lebih seperti Kota Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Lhokseumawe, Nagan Raya, dan Sabang, sedangkan tingkat partisipasi paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Aceh Timur dengan angka partisipasi sebesar 64,53 persen (BPS.2013).

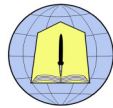
Pengeluaran Pemerintah Aceh Sektor Pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Aceh terdiri dari anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui anggaran pemerintah provinsi dan anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan data dari DJPK tahun 2014, komposisi anggaran pendidikan provinsi Aceh meningkat dari tahun 2006-2012. Pada tahun 2006 total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mencapai 1,79 triliun rupiah, dengan komposisi 1,624 triliun berasal dari pemerintah kabupaten/kota dan 0,166 triliun rupiah berasal dari pemerintah provinsi, hingga tahun 2012 total anggaran pendidikan di Provinsi Aceh mencapai 5,585 triliun rupiah, dengan komposisi 4,578 triliun berasal dari anggaran belanja pemerintah kabupaten/kota, dan sisanya 1,007 triliun rupiah berasal dari anggaran belanja pemerintah provinsi. Selain itu, tingkat pertumbuhan alokasi anggaran pendidikan terbesar terjadi dari tahun 2007 ke tahun 2008, dimana total anggaran pendidikan tahun 2008 mencapai 4.021 triliun rupiah, meningkat 81,87 persen dari tahun 2007. Peningkatan yang sangat besar tersebut dikarenakan provinsi Aceh menerima dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat guna mendukung pembangunan di Aceh.

PDRB Per Kapita Aceh

Peningkatan pendapatan regional menandakan bahwa perekonomian Provinsi Aceh terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS (2013) pertumbuhan PDRB riil dengan migas maupun Non-migas Aceh mencapai 5,20 persen dan 5,87 persen tahun 2012. Selanjutnya, PDRB nominal juga mengalami peningkatan sebesar 9,57 persen untuk PDRB nominal dengan migas dan 10,21 persen tanpa migas. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB migas memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan PDRB tanpa migas, hal tersebut menandakan bahwa adanya penurunan tingkat produksi migas di Provinsi Aceh.

Pendapatan regional per kapita provinsi Aceh juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2007 PDRB per kapita riil dengan migas mencapai 8,52 juta rupiah, sampai tahun 2010 PDRB dengan migas terus mengalami penurunan, dan meningkat kembali pada tahun-tahun berikutnya,



hingga tahun 2012 PDRB per kapita dengan migas mencapai 7,80 juta rupiah. Kondisi sebaliknya terjadi pada PDRB per kapita riil tanpa migas, yang menunjukkan peningkatan terus menerus, selain itu pergerakan perekonomian daerah juga mengikuti tren pergerakan perekonomian provinsi, dimana keseluruhan kabupaten/kota mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 (BPS,2013).

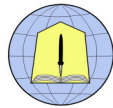
Pengujian Metode Analisis Data Panel

Berdasarkan pengujian model analisis dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM. Analisis persamaan untuk angka melek huruf (AMH) dengan uji chow menyimpulkan bahwa pendekatan FEM lebih baik dibandingkan PLS, hal ini terlihat berdasarkan nilai probabilitas yang didapatkan lebih kecil dari 0,1 (Pvalue = 0,0000) dengan taraf signifikansi 90 persen ($\alpha = 0,1$). Namun berdasarkan uji hausman, model REM lebih baik dibandingkan FEM, kesimpulan tersebut didasarkan pada nilai probabilitas yang melebihi 0,1 (P value = 0,5858), baik uji chow maupun uji hausman tidak memberikan kesimpulan yang tepat untuk menentukan model analisis yang digunakan, maka dengan demikian dibutuhkan uji LM sebagai alternatif pengujian pemilihan model, berdasar Uji LM disimpulkan bahwa pendekatan REM lebih baik dibandingkan PLS, dimana nilai Probabilitas yang didapatkan 0,0000 dan lebih kecil dari 0,1. Kemudian, analisis untuk persamaan angka partisipasi sekolah dasar (APS SD), berdasarkan uji chow menunjukan bahwa pendekatan FEM lebih cocok dibandingkan PLS, terbukti dengan nilai probabilitas yang didapatkan lebih kecil dari 0,1 (Pvalue = 0,0051) dengan taraf kepercayaan 90 persen ($\alpha = 10$ persen), akan tetapi Uji Hausman menyimpulkan hal yang berbeda, berdasarkan uji tersebut disimpulkan bahwa pendekatan REM lebih baik daripada FEM, terbukti dengan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan 0,1 (Pvalue = 0,8686). Baik uji chow maupun uji hausman tidak memberikan hasil yang konsisten, sehingga dibutuhkan uji LM untuk menentukan model analisis yang tepat. Berdasarkan uji LM didapatkan kesimpulan bahwa pendekatan REM lebih baik dibandingkan PLS, dimana nilai probabilitas yang didapatkan lebih kecil dari 0,1 (Pvalue = 0,0041). Selanjutnya, analisis angka partisipasi sekolah menengah pertama (APS SMP). Uji Chow menyimpulkan bahwa pendekatan FEM lebih tepat dibandingkan PLS, alasan tersebut menurut nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,1 (Pvalue = 0,0000), akan tetapi berdasarkan simpulan uji hausman memperlihatkan bahwa pendekatan REM lebih baik daripada FEM, dimana nilai probabilitas yang dihasilkan melebihi 0,1 (Pvalue = 0,1012), sedangkan Uji LM menyimpulkan bahwa pendekatan REM lebih baik dibandingkan PLS, dimana nilai probabilitas yang dihasilkan kurang dari 0,1 (Pvalue = 0,0051), dan pengujian untuk model analisis angka partisipasi sekolah menengah atas (APS SMA) menurut uji chow menjelaskan bahwa pendekatan FEM lebih baik daripada PLS dengan nilai probabilitas kurang dari 0,1 (Pvalue = 0,0000). Namun, uji hausman menyimpulkan bahwa pendekatan REM lebih baik dari FEM, dimana nilai probabilitas χ^2 lebih besar dari 0,1 ($P\chi^2 = 0,1607$) dan menurut uji LM didapatkan bahwa pendekatan REM lebih baik dari REM, dimana nilai probabilitas χ^2 lebih kecil dari 0,1 ($P\chi^2 = 0,0000$).Maka dapat disimpulkan bahwa model pendekatan yang sesuai untuk keempat persamaan tersebut adalah Random Effect Model (REM). Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jugde et al (Gujarati,2004: 650) jika time series data (T) lebih besar dibandingkan cross-sectional data (N) maka FEM lebih baik dibandingkan REM/ECM, dan apabila time series data (T) lebih kecil dibandingkan cross-section maka REM/ECM lebih baik.

Keterkaitan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Terhadap Angka Melek Huruf

Nilai konstanta dari regresi tersebut adalah 37,766613, yang berarti bahwa ketika pengeluaran pemerintah dan PDRB per kapita dalam keadaan konstan atau *ceteris paribus*, maka angka melek huruf akan mengalami peningkatan sebesar 37,76 persen. Sementara itu, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan angka melek huruf pada 23 kabupaten / kota dengan nilai koefisien sebesar 0,444559 , probabilitas 0,0004, dan nilai t hitung yang dihasilkan 3,676474. Hal ini berarti bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 1 persen, maka AMH akan meningkat sebesar 0,44 persen, dengan



asumsi *ceteris paribus*, sedangkan variabel PDRB per kapita juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka melek huruf 23 kabupaten / kota, dengan nilai koefisien sebesar 3,042638, probabilitas 0,0001, dan t hitung sebesar 3,982163. Hal ini berarti kenaikan 1 persen PDRB per kapita kabupaten/kota akan meningkat angka melek huruf sebesar 3,043 persen dengan asumsi faktor lain bernilai konstan. Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenny (2008), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita suatu wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan angka melek huruf.

Tabel 1.

Pengujian Model Analisis Data Panel

Indikator Persamaan	Bentuk Pengujian					
	Chow Test (PLS/FEM)		Hausman Test (REM/FEM)		LM Test (PLS/REM)	
	χ^2 Statistik	Prob.	χ^2 Statistik	Prob.	χ^2 Statistik	Prob.
AMH	491,8181	0,0000	1,069470	0,5858	9,4180027	0,0000
APS SD	42,736245	0,0051	0,281778	0,8686	2,647271	0,0041
APS SMP	70,001171	0,0000	4,581775	0,1012	2,523403	0,0058
APS SMA	113,628719	0,0000	3,656624	0,1607	4,562795	0,0000

Signifikansi $\alpha = 10$ persen. Sumber : Hasil Olah Data E-views 7.2, 2014.

Tabel 2.

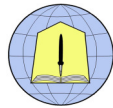
Hasil Estimasi Angka Melek Huruf (AMH)

Variabel	Coe ficient	Std. Error	T- Statistik	Pr obabilitas
C	37,7 66613	39	11,180 7892	3,37 0010
PSP	0,44 4559	20	0,1209 6474	3,67 0004
PD	3,04 2638	67	0,7640 2163	3,98 0001
RBK				
	R ² = 0,292385	F-test = 23,13902	DW = 1,233894	

Keterangan: signifikan pada $\alpha = 10\%$. Sumber: Hasil Pengolahan Data E-Views 7.2, 2014.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah

Hasil estimasi persamaan angka partisipasi sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat angka partisipasi sekolah das (APS SD) menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB per kapita riil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap APS SD. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar 0,172143 dan $P_{\text{value}} = 0,162215$, hal ini berarti ketika pengeluaran pemerintah

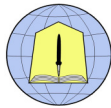


untuk pendidikan meningkat sebesar 1 persen, maka angka partisipasi sekolah dasar akan meningkat sebesar 0,17 persen, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Variabel PDRB per kapita riil memiliki nilai koefisien estimasi 0,162215 dan $P_{\text{value}} = 0,4434$, hal ini menandakan bahwa peningkatan 1 persen PDRB per kapita riil akan meningkatkan 0,16 persen tingkat partisipasi sekolah dasar, sedangkan nilai koefisien konstanta dari hasil estimasi persamaan APS SD sebesar 92,19279 dan $P_{\text{value}} = 0,0000$. Jika kondisi PDRB per kapita riil maupun pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan kostan, maka angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar sebesar 92,293 persen. Kemudian, persamaan angka partisipasi sekolah menengah pertama (APS SMP) menunjukkan bahwa kedua variabel bebas baik pengeluaran pemerintah pada pendidikan dan PDRB per kapita riil memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap partisipasi sekolah menengah pertama, nilai koefisien estimasi untuk pengeluaran pemerintah sebesar 0,626105 dan $P_{\text{value}} = 0,2064$. Kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah akan menyebabkan angka partisipasi sekolah menengah pertama meningkat sebesar 0,62 persen, dengan asumsi *ceteris paribus*, nilai koefisien estimasi PDRB per kapita sebesar 1,447518 dan $P_{\text{value}} = 0,1700$ memiliki makna bahwa jika PDRB per kapita riil meningkat sebesar 1 persen, maka angka partisipasi sekolah akan meningkat sebesar 1,45 persen dengan asumsi *ceteris paribus*, sedangkan nilai koefisien konstanta estimasi persamaan APS SMP sebesar 56,17179 dan $P_{\text{value}} = 0,0054$ yang berarti tanpa adanya PDRB per kapita dan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan APS SMP akan sebesar 56,17 persen, dan yang terakhir hasil estimasi persamaan APS SMA, nilai koefisien konstanta estimasi tersebut -90,36016 dan $P_{\text{value}} = 0,0607$ yang menandakan bahwa tanpa adanya peningkatan pengeluaran pemerintah dan PDRB per kapita riil angka partisipasi sekolah menengah atas (APS SMA) akan turun menjadi 90,36 persen. Kemudian variabel pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap APS SMA dengan nilai koefisien estimasi 1,722677 dan $P_{\text{value}} = 0,1057$, hal tersebut berarti peningkatan 1 persen pengeluaran pemerintah, maka akan meningkatkan APS SMA sebesar 1,723 persen dengan asumsi *ceteris paribus*, sedangkan variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap APS SMA dengan nilai koefisien estimasi sebesar 7,731103 dan $P_{\text{value}} = 0,0056$ yang bermakna bahwa peningkatan 1 persen pertumbuhan ekonomi atau PDRB per kapita riil akan meningkatkan 7,73 persen APS SMA dengan asumsi *ceteris paribus*.

Tabel 3
Hasil Estimasi Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Variabel	Model Persamaan		
	APS SD	APS SMP	APS SMA
C	92,19279 (0,0000)*	56,17179 (0,0054)*	-90,36016 (0,0607)*
PSP	0,172143 (0,12277)	0,62615 (0,2064)	1,722677 (0,1057)
PDRBK	0,162215 (0,4434)	1,447518 (0,1700)	7,731103 (0,0056)*
R²	1,576504	1,875198	5,865438
F_{test}	0,027381	0,032411	0,09480

Keterangan: () probabilitas *) signifikansi $\alpha = 10\%$. Sumber: Hasil Pengolahan data E-views 7.2, 2014.



PENUTUP

Kesimpulan

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita riil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) 23 kabupaten / kota di Provinsi Aceh. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki nilai koefisien estimasi 0,444559 dan nilai t-statistik 3,676474 yang berarti peningkatan 1 persen pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan meningkatkan angka melek huruf sebesar 0,44 persen, sedangkan PDRB per kapita riil memiliki nilai koefisien sebesar 3,042638 dan nilai t-statistik 3,982163, dimana peningkatan PDRB per kapita riil 1 persen, akan meningkatkan angka melek huruf sebesar 3,043 persen dengan asumsi faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan PDRB per kapita riil memiliki pengaruh positif terhadap angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Hasil estimasi Angka Partisipasi Sekolah Dasar (APS SD) menunjukkan nilai koefisien estimasi pengeluaran pemerintah sebesar 0,172143 dan nilai probabilitas 0,1277. Peningkatan 1 persen pengeluaran pemerintah sektor pendidikan akan meningkatkan APS SD sebesar 0,17 persen. Sedangkan PDRB per kapita riil memiliki nilai koefisien 0,162215 dan probabilitas 0,4434. Hal ini berarti peningkatan 1 persen PDRB per kapita akan meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar sebesar 0,626105, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan.

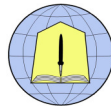
Selanjutnya, Angka partisipasi sekolah menengah pertama menunjukkan nilai koefisien estimasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan sebesar 0,626105 dan nilai probabilitas 0,2064, peningkatan 1 persen pengeluaran pemerintah akan meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah pertama sebesar 0,63 persen. Sedangkan PDRB per kapita riil memiliki nilai koefisien estimasi 1,447518 dan nilai probabilitas 0,1700 yang berarti bahwa peningkatan 1 persen PDRB per kapita, akan meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah pertama sebesar 1,44 persen. Kemudian, angka partisipasi sekolah menengah atas memiliki nilai koefisien estimasi untuk pengeluaran sebesar 1,722677 dan $P_{\text{value}} = 0,1057$, yang berarti peningkatan 1 persen pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan meningkatkan APS SMA sebesar 1,722 persen, sedangkan PDRB per kapita riil memiliki koefisien estimasi 7,731103 dan $P_{\text{value}} = 0,0056$, hal ini berarti peningkatan 1 persen PDRB per kapita riil akan meningkatkan APS SMA sebesar 7,73 persen.

Saran

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terbukti berhasil meningkatkan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah di 23 kabupaten / kota yang ada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh baik pemerintah provinsi maupun kabupaten / kota harus meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk sektor pendidikan guna mendukung terciptanya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan di Provinsi Aceh. Kemudian, kapasitas pengawasan dan pengelolaan terhadap aliran dana yang telah dialokasikan harus ditingkatkan agar penggunaan dana-dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.

Angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah juga terbukti dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Oleh sebab itu, pemerintah harus berusaha meningkatkan produktivitas perekonomian daerah sehingga PDRB per kapita dapat meningkat. Peningkatan PDRB per kapita mencerminkan peningkatan kemampuan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri, terutama kebutuhan akan pendidikan. Selain itu, peningkatan anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah sebagai subsidi dan pembiayaan biaya operasional sekolah akan mengurangi beban masyarakat. Namun, biaya tidak langsung dan biaya penunjang pendidikan masih banyak yang harus ditanggung oleh masyarakat. Maka dari itu, peningkatan PDRB per kapita secara langsung akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk bersekolah.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambah indikator-indikator lainnya yang dianggap mendukung pembangunan pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah, tingkat kelulusan ujian nasional, ketersediaan tenaga pengajar, dan ketersediaan sarana dan prasarana lainnya, serta



menambahkan jumlah tahun penelitian, karena dalam penelitian ini hanya menggunakan data 5 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2013). *Indikator Pendidikan Aceh*. Banda Aceh. . *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh*. Banda Aceh.
- Baltagi, B. H.(2005). *Econometrics Analysis of Panel Data*, 3th Edition. John Wiley and Sons, Ltd.England.
- Chude, N. P. dan Daniel I. C.(2013). “Impact Of Government Expenditure On Economic Growth In Nigeria”.*International Journal Of Bussiness and Management Review*, 1(4): 66-71.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Data Keuangan Daerah*.Diakses, 1 Juli 2014. <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk>.
- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis*, 5th Edition. Prentice Hall, New Jersey.
- Gujarati, N. D. (2004). *Basic Econometrics*, 4th Edition. Mc.Graw Hill, New York.
- Johnston, J. dan John, D. (1997). *Econometrics Methods*, 4th Edition. Mc Grew Hill, New York.
- Kementerian Dalam Negeri Indonesia (2014).*Data Daerah Otonomi Baru*.Diakses 1 Juli 2014.www.kemendagri.go.id.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi, Edisi 6*. Erlangga Jakarta.
- _____ (2010). *Principles Of Macroeconomics*, 6th Edition. South-Western,USA.
- Musgrave, R. A. dan Peggy, B. M. (1993).*Keuangan Negara*, Edisi 5.Erlangga Jakarta.
- Nachrowi, N. D. dan Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Rahman, M. S. (2013). “Relationship Among GDP, Per Capita GDP, Literacy Rate, and Unemployment Rate.” *British Journal of Art and Social Services*, 14(11): 169-177.
- Soepangat, E. dan Haposan, L. G. (1991).*Pengantar Ilmu Keuangan Negara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Todaro, M. P. (1995). *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*, Edisi 3. Bumi Aksara, Jakarta.
- United Nations Development Programme (2013).*Laporan Pembangunan Aceh*. Jakarta.
- Yenny, M. (2008).“Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Pendidikan di Indonesia”.*Jurnal Kebijakan Ekonomi*, Vol. 4 No.1, (63-75).

